KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Legilator minta jaminan perlindungan data pribadi
Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Legislator Minta Jaminan Perlindungan Data Pribadi

Legislator Senayan meminta Pemerintah menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi sebelum penerapan sistem pemantauan aktivitas keuangan, Payment ID. Mitigasi sejak dini perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko pelanggaran privasi.

PAYMENT ID adalah sistem yang dirancang memantau secara real time aktivitas keuangan pengguna. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga aktivitas berisiko seperti judi online dan pinjaman ilegal.

Sistem ini akan disinkronkan dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Bertu Merlas mengapresiasi langkah Bank Indonesia meluncurkan sistem Payment ID. Namun diingatkan, ketahanan digital Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi serangan atau kebocoran data.

"Kami mengapresiasi inovasi sistem pembayaran melalui Payment ID. Namun, Pemerintah harus memastikan privasi pengguna benar-benar terjaga, jangan sampai dimanfaatkan pihak tidak berkepentingan," kata Bertu di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Karena itu, mitigasi sejak dini mutlak dilakukan. Jangan sampai inovasi ini menciptakan masalah baru yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Pasalnya, kebocoran data pribadi bisa menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Tujuan mulia sistem ini akan tercoreng jika keamanan privasi gagal dijaga.

Bertu mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh selama uji coba, agar risiko dapat diminimalkan sebelum penerapan penuh.

"Selagi masih uji coba, ini momentum penting memastikan sistem tepat sasaran dan tahan terhadap kerentanan," ujar Anggota Komisi XI DPR itu.

Bertu menilai, Payment ID memiliki akses yang sangat

Bertu Merlas

luas terhadap aktivitas transaksi keuangan setiap individu. Sistem ini dapat mengidentifikasi profil pengguna, memverifikasi data transaksi, memastikan validitas, serta menghubungkan informasi individu dengan catatan transaksi keuangan secara rinci.

"Besarnya akses ini jika tidak benar-benar dikelola dengan baik dari sisi keamanan data, berpotensi merugikan nasabah layanan jasa keuangan di Tanah Air," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Senada, anggota Komisi I DPR Sarifah Ainun Jariyah juga menyoroti keamanan data masyarakat dalam kebijakan Payment ID dalam transaksi digital. Karena itu, dia mengusulkan tiga alternatif terkait penerapan kebijakan tersebut.

Pertama, perbaikan sistem pajak dengan memberikan kompensasi otomatis. Kedua, penundaan Payment ID hingga infrastruktur keamanan data benar-benar siap. Ketiga, penerapan model pelaporan berkala bukan pelaporan per transaksi.

Dia bilang, Pemerintah harus belajar dari penerapan hal tersebut dari negara lain.

"Insentif, bukan paksaan, perlindungan, bukan eksploitasi. Komisi I DPR akan terus mengawal isu ini untuk memastikan hak warga terlindungi," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Kebijakan pelaporan dalam transaksi keuangan, lanjutnya, bukan hal baru dan sudah diterapkan di beberapa negara. Australia dan beberapa negara lain, pelaporan setiap pembelian memang ada, tetapi disertai kompensasi nyata seperti pengembalian pajak atau tax refund sebesar 10-15 persen.

"Sistem kita belum siap memberikan penghargaan serupa kepada wajib pajak," ujarnya.

Politikus asal daerah pemilihan Banten II itu memaparkan alasan utama terkait usulannya. Pertama, sistem perpajakan Indonesia dinilai belum mampu memberikan insentif memadai. Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat hanya 16,5 juta wajib pajak aktif dari total 275 juta penduduk.

Kedua, infrastruktur digital Indonesia masih rentan. Menurut Indonesia Data Protection Authority, sepanjang 2023-2024 terjadi 3.814 kasus kebocoran data. Ketiga, perlindungan hukum bagi korban kebocoran data dinilai belum memadai.

Dia mencontohkan kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2023 yang menimpa 279 juta orang, tapi tidak disertai kompensasi memadai bagi korban. ■ PYB